



RENCANA KERJA (RENJA) 2024

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



[Handwritten Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



[Handwritten Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkong;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.


BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada segenap aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat menyusun ulang dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Renja Tahun 2024 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan umum program pembangunan untuk kurun waktu satu tahun kedepan diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga yang penyusunannya berdasarkan/mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kabupaten Purbalingga dan Renstra DINRUMKIM tahun 2021 – 2026 berisi uraian gambaran umum hasil evaluasi dan capaian Renja satu tahun sebelumnya, permasalahan dan kondisi aktual yang dihadapi, tujuan, sasaran, strategi kebijaksanaan yang diambil, serta program – program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

Dokumen Renja 2024 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jajaran DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dengan terbuka menerima saran, masukan, kritik yang membangun demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renja Tahun 2024 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini dapat membantu dan menjadi acuan jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Purbalingga,

2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. IMAM HADI, MSi

NIP. 19650104 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 .Latar Belakang	1
1.2 .Landasan Hukum	3
1.3 .Maksud dan Tujuan	4
1.4 .Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 .Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 .Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 .Review terhadap Rancangan RKPD	23
2.5 .Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63
3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	68
BAB V. PENUTUP	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan RENJA melalui beberapa tahap yaitu: Penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dilaksanakan proses penjaringan usulan mulai dari musrenbang Kecamatan yang hasilnya kemudian ditelaah diverifikasi, dianalisis menjadi bahan yang dibahas pada tingkat forum Perangkat Daerah. Selanjutnya digunakan untuk penyusunan rancangan renja sebagai penyempurnaan renja awal. Selanjutnya diverifikasi oleh Bappelitbangda untuk memastikan rancangan ranwal PD telah selaras dengan ranwal RKPD dan mengakomodir hasil forum PD setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah perumusan rancangan akhir renja PD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir renja PD berdasarkan perbup tentang RKPD.

Proses penyusunan Renja ini telah mempertimbangkan keterkaitan program kegiatan yang ada di RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, agar terjaga adanya keselarasan program dan kegiatan dengan pemerintah tingkat pusat dan tingkat provinsi.

Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) sebagai bagian integral dari pembangunan bidang – bidang lainnya di

Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Penyusunan RENJA 2024 ini sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan kegiatan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga yaitu **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**, sedangkan Misi yang terkait dengan PD DINRUMKIM yaitu :

Misi 1 yaitu, *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Misi 3 yaitu, *Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.*

Sedangkan turunannya ke Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah:

a. VISI

Visi DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam mendukung program pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :

TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHANYANG MANTAP

b. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Misi pada Renja 2024, sebagai berikut :

b1. Mewujudkan pelaksanaan tugas DINRUMKIM yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

- b2. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan lingkungan perumahan maupun pemukiman yang aman, mantap dan layak sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib, sehat dan aman di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.
- b3. Mewujudkan ketersediaan air bersih sanitasi lingkungan bagi masyarakat.
- b4. Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan, pengadaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan pemanfaatan tanah Eks Bengkok milik Pemkab.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENJA 2024 adalah :

- a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021- 2026; dan
- l) Surat Keputusan Bupati Purbalingga No. 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2024 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga tahun 2024 disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman dalam menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
2. Sebagai acuan evaluasi capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Dinrumkim Tahun 2024;

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA 2024 ini disusun dengan sistematika:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang sebagian tugas pokok fungsinya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai tahun kedua dari Renstra tahun 2021 – 2026, PD Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan sebagaimana yang ada dalam Dokumen APBD 2022 dapat diuraikan secara garis besar sebagaimana pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	Urusan/Urusan Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Renstra s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	1,4%	1,04%	1,85%	1,74%	94,05	1,39%	4,17%	2,8%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum	1.000 SR	1.000 SR	1.400 Rumah Tangga	2.701 Rumah Tangga	1.007,84	3.068 Rumah Tangga	7.309 Rumah Tangga	7,3%

	di Daerah Kab/Kota									
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	20 SR	40 SR	2.120 SR			650 SR		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di Kawasan pedesaan yang dibangun	30 SR	25 SR	-			14 Desa		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang dibangun	30 SR	25 SR	22 desa			15 Desa		
b.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	2,5%	0,87%	2,5%	1,49%	59,60	2,5%	4,86	0,2%
2.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan persampahan yang terbangun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			150 Rumah Tangga			1.400 Rumah Tangga		

c.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n	1,42%	0,69%	1,44%	0,41%	28,47	1,44%	2,54	1,79%
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota	Jumlah SPALD-S yang di bangun	8	11	4 Lokasi	4 Lokasi	100	13 Lokasi	28 Lokasi	3,5%
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	268 Rumah Tangga			968 Rumah Tangga		
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	NA	NA	Na			50 Rumah Tangga		
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
d.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	Perangkat Daerah									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100%
5.	Administrasi Keuangan	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	100	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	150 Dokumen	150 Dokumen	55 Dokumen	156 Dokumen	283,64	150 Dokumen	456 Dokumen	3,04%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100	24 Unit	24 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	20 Unit	100%
e.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapaiannya SPM bidang perumahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
10	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Persentase terdatanya rumah korban bencana alam atau relokasi program	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

	Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	pemerintah Kabupaten / Kota								
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
11	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	40 Orang	40 Orang	100%

	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	25 Orang	25 Orang	100 Orang	100 Orang	100	25 Orang	25 Orang	100%
12	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	1 Unit	NA	20 Unit	19 Unit	95	1 Unit	1 Unit	100%
	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Unit	NA	5 Unit	5 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%
13	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
f.	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Na	0	12,44%	76,39%	32,23	24,88%		

14	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	NA	0	0,8 Ha	4,01%	501	9 Ha		
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU			8 Dokumen	11 Dokumen	137,5	1 Dokumen		
g.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	96,09%	96,90%	97,49%	100,61	97,71%	291,29%	2,91%
15	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	2.000 Unit Rumah	1.000 Unit Rumah	2.000 Unit Rumah	1.318 Unit Rumah	65,9	1.300 Unit Rumah	3.618 Unit Rumah	1,81%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1.100 Unit Rumah	478 Unit Rumah	800 Unit Rumah	43 Unit Rumah	5,36	43 Unit Rumah	564 Unit Rumah	0,51%

	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
h.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak	84,91%	75,47%	77,36%	100%	100	79,25%	254,72%	3%
16	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditangani	12 Lokasi	Na	12 Lokasi	1 Lokasi	0,83%	12 Lokasi	13 Lokasi	1,08%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
i.	Program Penyelesaian	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

	Sengketa Tanah Garapan	yang dilakukan melalui mediasi								
17	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	NA	4 Berita Acara	3 Berita Acara	75	4 Berita Acara	4 Berita Acara	100%
j.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
18	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti	3 Dokumen	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
k.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	0,27%	0,1%	0,27%	0,56%	207,41	0,27%	0,93%	3,4%
19	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota	Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Indikator Cakupan akses air minum layak tahun 2021 mencapai 93,01% pada tahun 2022 realisasi mencapai 94,75% ada persentase kenaikan sebesar 1,74%. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pamsimas, fasilitasi kegiatan HAMP, HID, dari dana DAK dengan bentuk pekerjaannya yaitu pembangunan sistem air minum.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Indikator kinerja meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2021 capaian kerjanya adalah 93,18%. Pada tahun 2022 dengan target sebesar 92,38% dicapai sebesar 93,59%, ada persentase peningkatan sebesar 0,41%. Capaian tersebut merupakan kontribusi penanganan IPLT di 11 lokasi. Juga jambanisasi yang dikelola PD terkait.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh, pada tahun 2021 telah mencapai 98,48%. Pada tahun 2022 kawasan kumuh yang tertangani sebesar 4,01 ha atau 0,05% dari total kumuh sebesar 344,28 ha (berdasarkan SK Kumuh terbaru).
Persentase luasan kawasan tidak kumuh, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan update data kawasan kumuh dalam SK Bupati nomor 640/212 Tahun 2021, terdapat total kawasan kumuh adalah 344,28 ha, dimana yang 80,40 ha adalah menjadi kewenangan Kabupaten, sedangkan 48,91 ha merupakan kewenangan Provinsi dan 214,97 ha kewenangan Pusat.
- d. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Cakupan pemanfaatan tanah pemda, pada tahun 2021 telah mencapai 92,19%, sedangkan pada tahun 2022 telah mencapai 92,75% ada persentase kenaikan sebesar 0,63%.

e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu, dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dicapai adalah merupakan bentuk fasilitasi terhadap PD yang membutuhkan / melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, sampai dengan tahun 2021 capaian kinerjanya adalah 100%. Demikian pula pada tahun 2022 memberikan fasilitasi pengadaan tanah untuk pengembangan Panti Nugroho juga selesai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja perangkat daerah dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Catatan Analisis
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai SAKIP DINRUMKIM		IKK	68,38	68,88	69,38	69,88	68,40	72,41	69,38	69,88	
2	Cakupan akses air minum layak	SPM	IKK	92,05	92,45	92,86	92,86	93,01	94,75	92,86	92,86	
	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	SPM	IKK	1,04	0,40	0,40	0,40	0,84	1,74	0,40	0,40	
3	Cakupan sanitasi layak	SPM	IKK	92,26	92,38	92,50	92,62	93,18	93,59	92,50	92,62	
	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	SPM	IKK	1,49	0,12	0,12	0,12	0,92	0,41	0,12	0,12	
4	Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh		IKK	98,92	99,05	99,19	99,32	98,92	98,97	99,19	99,32	
	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan		IKK	100	0,13	0,13	0,13	0	0,05	0,13	0,13	
5	Cakupan pemanfaatan tanah pemda		IKK	92,19	92,46	92,73	93,00	87,6	92,75	92,73	93,00	
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dari table 2.2 tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, demikian juga realisasi pada tahun 2022.

Peningkatan capaian kinerja berbanding lurus dengan ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahunnya, termasuk yang dikucurkan dari pemerintah pusat, melalui DAK air minum dan sanitasi, dana BSPS dan DAK perumahan untuk rehab rumah tidak layak huni, serta dana dari Provinsi untuk pemugaran/rehab rumah tidak layak huni.

Sehubungan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman setiap tahunnya berusaha mendapatkan tambahan dana dari pemerintah provinsi dan pusat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada isu strategis dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 yaitu :

- Masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah yang layak huni, sehingga masih diperlukan adanya kepedulian pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin melalui fasilitasi kegiatan untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya ternyata masih adanya RTLH yang belum masuk dalam database pemugaran RTLH.
- Masih adanya rumah tangga yang belum terakses air minum/air bersih dan sistem sanitasi.
- Masih adanya kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlu adanya program/kegiatan yang mendukung pada peningkatan penyediaan prasarana perumahan dan permukiman untuk meningkatkan

kesehatan lingkungan permukiman sekaligus mengurangi permukiman kumuh.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah PD Dinas Perumahan dan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Fungsi Dinas itu sendiri yang berlandaskan dengan IKU dan SPM. SPM yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman adalah SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kab/Kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kab/Kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari sisi anggaran hasil pelaksanaan anggaran tahun yang lalu masih kurangnya dukungan anggaran guna mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya akselerasi dukungan anggaran guna mencapai target.

Dengan adanya program pemerintah Pusat dan Provinsi serta lembaga-lembaga lain termasuk CSR dari perusahaan adalah merupakan peluang yang baik guna mendukung pencapaian menurunkan rumah tidak layak huni (RTLH).

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Program / kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah pada umumnya sudah terakomodir di dalam RKPD. Hanya besaran anggarannya yang kadangkala tidak sesuai dengan usulan awal

karena adanya kebijakan pengalihan prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya yang lebih mendesak atau lebih prioritas.

Disisi lain target capaian kinerja tidak dirubah dan atau tidak ada dukungan anggaran dan kegiatan untuk mencapai/memenuhi target kinerja, sehingga bisa mengakibatkan pada akhir tahun anggaran/pelaksanaan Renja target tidak tercapai.

Hal lain yang kadang terjadi adalah munculnya suatu kegiatan yang tidak diusulkan PD, namun masih masuk dalam lingkup PD, sehingga untuk jenis kegiatan yang sifatnya teknis diperlukan koordinasi yang simultan dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam penyusunan perencanaan teknis dan kondisi faktual di lapangan.

Terkait dengan adanya ketentuan baru dalam penyusunan perencanaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020, maka perlu adanya sinkronisasi pogram/kegiatan tahun sebelumnya yang sudah baku mengalami perubahan total, sehingga ada sebagian program kegiatan yang tidak/belum bisa tertampung pada urusan/program dan kegiatan sesuai yang ada dalam nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2020.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN PURBALINGGA

Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Purbalingga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	1,39%	12.513.446	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Purbalingga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	1,39%	16.863.501	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air	1.500 SR	12.513.446	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air	1.500 SR	16.863.501	

	Kab/Kota		minum			Kab/Kota		minum			
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	25 SR	NA	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	650 SR	2.150.505	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM jaringan perpipaan di Kawasan pedesaan yang dibangun	30 SR	NA	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM jaringan perpipaan di Kawasan pedesaan yang dibangun	30 SR	8.226.000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang dibangun	30 SR	NA	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang dibangun	30 SR	6.486.996	
b.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Purbalingga	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	2,5%	1.820.000	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Purbalingga	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	2,5%	4.081.000	
2.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah		Persentase bangunan persampahan yang terbangun	100%	1.820.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah		Persentase bangunan persampahan yang terbangun	100%	4.081.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.400 Rumah Tangga	1.820.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.400 Rumah Tangga	4.081.000	
c.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Purbalingga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	1,44%	3.442.932	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Purbalingga	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	1,44%	7.801.387	
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota		Jumlah SPALD-S yang di bangun	300 Rumah	3.442.932	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota		Jumlah SPALD-S yang di bangun	300 Rumah	7.801.387	
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	968 Rumah Tangga	3.442.932	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	968 Rumah Tangga	7.301.387	
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	50 Rumah Tangga	NA	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	50 Rumah Tangga	500.000	
B.	Urusan Pemerintahan					Urusan Pemerintahan					

	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
d.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinrumkim				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinrumkim				
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	11.825	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	4.565	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	6.852	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	2.490	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	5.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	2.075	
5.	Administrasi Keuangan		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.003.722	Administrasi Keuangan		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.320.400	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Org/bln	2.913.112	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Org/bln	3.157.910	
	Penyediaan Administrasi		Jumlah dokumen hasil penyediaan	150 Dok	70.610	Penyediaan Administrasi		Jumlah dokumen hasil penyediaan	150 Dok	89.690	

	Pelaksanaan Tugas ASN		administrasi pelaksanaan tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN		administrasi pelaksanaan tugas ASN			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dok	20.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dok	72.800	
6.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	62.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	23.158	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	62.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	23.158	
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	719.685	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	62.158	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	1 Paket	2.050	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan	1 Paket	851	

			bangunan kantor yang disediakan					bangunan kantor yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	50.587	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	49.536	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dok	NA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dok	996	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	16.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	6.194	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dok	9.600	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dok	4.581	
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	6.525	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	484.944	
	Penyediaan Jasa		Jumlah laporan	1 Lap		Penyediaan Jasa		Jumlah laporan	1 Lap	467	

	Surat Menyurat		penyediaan jasa surat menyurat			Surat Menyurat		penyediaan jasa surat menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	1.125	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	23.366	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Lap	1.300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Lap	539	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lap	595.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lap	460.572	
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	126.433	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	165.778	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	24 Unit	126.433	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	24 Unit	163.070	

	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	6.525	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	2.708	
e.	Program Pengembangan Perumahan		Persentase tercapaiannya SPM bidang perumahan	100%	366.250	Program Pengembangan Perumahan		Persentase tercapaiannya SPM bidang perumahan	100%	221.008	
10	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase terdatanya rumah korban bencana alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota	100%	25.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase terdatanya rumah korban bencana alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota	100%	5.550	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dok	5.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dok	2.775	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian		Jumlah dokumen data rumah korban bencana	1 Dok	5.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian		Jumlah dokumen data rumah korban bencana	1 Dok	2.775	

	Sebelumnya yang Belum Tertangani		Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani			Sebelumnya yang Belum Tertangani		Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani			
11	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	100%	14.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	100%	6.470	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	5.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	3.695	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	25 Orang	5.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	25 Orang	2.775	
12	Pembangunan dan Rehabilitasi		Persentase rumah korban bencana	100%	290.000	Pembangunan dan Rehabilitasi		Persentase rumah korban bencana	100%	201.708	

	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		yang direhabilitasi			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota		yang direhabilitasi			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	3 Unit	170.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	3 Unit	38.900	
	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang dibangun	3 Unit	80.000	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang dibangun	3 Unit	162.808	
13	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	100%	23.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	100%	7.280	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Lap	23.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Lap	7.280	
f.	Program Kawasan Permukiman	Kab. Purbalingga	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	24,77%	921.250	Program Kawasan Permukiman	Kab. Purbalingga	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	24,77%	2.501.792	
14	Peningkatan Kualitas Kawasan		Luas kawasan kumuh yang	NA	921.250	Peningkatan Kualitas Kawasan		Luas kawasan kumuh yang	9 Ha	2.501.792	

	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		ditangani			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		ditangani			
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	1 Dok	921.250	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	1 Dok	2.501.792	
g.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Purbalingga	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,71%	1.525.000	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Purbalingga	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,71%	12.548.178	
15	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota		Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	2.000 Rumah	1.525.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota		Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	2.000 Rumah	12.548.178	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	148 Unit	1.525.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	148 Unit	12.548.178	

	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
h.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Kab. Purbalingga	Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak	79,25%	1.633.600	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Kab. Purbalingga	Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak	79,25%	756.270	
16	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah PSU yang ditangani	12 Lokasi	1.633.600	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah PSU yang ditangani	12 Lokasi	756.270	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Lap	1.620.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	1 Lap	751.870	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 Lap	13.600	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	1 Lap	4.400	

	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
i.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanah Eks. Bengkok Kab. Purbalingga	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	10.000	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tanah Eks. Bengkok Kab. Purbalingga	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	1.385	
17	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota		Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	100%	10.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota		Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	100%	1.385	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota		Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 BA	10.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota		Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 BA	1.385	
j.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan	Kab. Purbalingga	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan	100%	500.000	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan	Kab. Purbalingga	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan	100%	110.045	

	Santunan Tanah Untuk Pembangunan		santunan tanah untuk pembangunan			Santunan Tanah Untuk Pembangunan		santunan tanah untuk pembangunan			
18	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	100%	500.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota		Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	100%	110.045	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	110.045	
k.	Program Penatagunaan Tanah	Tanah Eks. Bengkulu Kab. Purbalingga	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah	0,27%	89.000	Program Penatagunaan Tanah	Tanah Eks. Bengkulu Kab. Purbalingga	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah	0,27%	136.575	

			daerah					daerah			
19	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota		Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	80,74%	89.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota		Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	80,74%	136.575	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dok	89.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dok	136.575	
TOTAL					26.751.668					49.092.144	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	6
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Cahyana Baru Penambongan RT. 003 RW. 004, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	di teruskan ke Dinrumkim
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Desa Mergasana, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	Dapat dianggarkan dari dana desa
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Mergasana, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Diusulkan di tahun 2024
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 4 RW 1, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 5 RW 1, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	usulan diteruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 1,5,6 RW 2, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Komplek Perumahan Griya Abdi Kencana, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	RT 2/2, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas

	Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		lingkungan kelurahan	dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
9	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 3/2, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
10	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 4/2, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
11	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 5 RW 2, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 5 RW 2, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
13	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rt. 03 Rw. 09 kelurahan purbalingga wetan, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
14	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Sekar saroja Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Purbalingga wetan, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
15	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 6/2, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Sudah dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.
16	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW 1,2,4, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
17	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 7 RW 3, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	usulan ditampung dan akan diusulkan di APBD 2024

18	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 3 RW 4 , Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
19	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 3 RW 4, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
20	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jln. Kemuning raya, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN/ESDM)
21	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 3 RW 5, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan akan di akomodir APBD jika ada anggaran
22	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 5 RW 5, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di akomodir di APBD jika tersedia anggaran
23	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Condong dusun I, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
24	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 5 RW 5, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
25	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 6 RW 5, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
26	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 7 RW 5, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Usulan di teruskan ke DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (volume dan Anggaran disesuaikan kembali)
27	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk	Desa Klapasawit RT 03 RW 03, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)

	Menunjang Fungsi Hunian			
28	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa kasih, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Sudah mendapatkan anggaran HAMP di tahun 2023
29	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	sudah mendapatkan program DAK di tahun 2023
30	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	desa karangtengah, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Diusulkan tahun 2024
31	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN)
32	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	karangtengah, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
33	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
34	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	desa karangtengah, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
35	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan di tahun 2024
36	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 Desa Bodaskarangjati, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa
37	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pasunggingan RT, 18 RW 08 Dusun IV, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan ke ESDM Provinsi Jawa tengah
38	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tumanggal, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
39	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Kab.	Rehabilitasi rumah tidak layak	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan

		Purbalingga	huni	kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
40	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pengadegan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
41	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pasunggingan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
42	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Panunggalan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
43	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT. 01, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
44	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pasunggingan RT. 22 RW 10 Dusun V sampai Dusun I, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
45	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Pengadegan, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Diusulkan ke ESDM Provinsi Jawa Tengah
46	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Larangan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
47	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Larangan, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
48	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	tegalpingen rt 02 rw 02 , rt 05 rw 05, rt 06 rw 05, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
49	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk	Larangan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.

	Menunjang Fungsi Hunian			
50	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pengadegan Dusun Karangtengah dan Dusun Gumenggeng, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
51	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	tegalpingen, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
52	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Panunggalan, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
53	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pengadegan Dusun 6 RT 007 RW 021, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN/ESDM)
54	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Serayukaranganyar, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
55	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Metenggeng, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
56	Pembangunan SPAM JAaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RT 01 RW 01, Kadus I, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
57	Pembangunan SPAM JAaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 5 Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
58	Pembangunan SPAM JAaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lambur, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	dianggarkan dari dana desa
59	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 2 RT 02 RW 02, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)
60	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kadus I dan Kadus II, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan

			huni	kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
61	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun I dan Dusun II Desa Banjaran, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
62	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pagedangan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
63	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
64	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
65	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
66	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
67	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	dusun II, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Sudah mendapatkan DAK tahun 2023
68	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tajug Dusun I sampai dengan Dusun V, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
69	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RT 01 RW 01 Kadus 1 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	sudah mendapatkan DAK tahun 2023
70	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RT 02 RW 08 Kadus 4 dan Kadus 5 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab.	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	Sudah mendapatkan DAK tahun 2023

		Purbalingga		
71	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun II Dukuh Tungkeb RW 01, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	-
72	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Lambur, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
73	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
74	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
75	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	tamansari, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
76	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Talagening, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
77	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rt 008, 009, 010 Rw 003 Dusun II, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN/ESDM)
78	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DESA RAJAWANA, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
79	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1-5, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
80	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk	DESA RAJAWANA, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.

	Menunjang Fungsi Hunian			
81	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Purbasari, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
82	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Babakan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
83	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Palumbungan Wetan RT004 RW002, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
84	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Brakas Kadus 2, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
85	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Palumbungan Wetan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
86	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RT. 06 (Relokasi Gelam), RT. 05 (Jlewus) RW. 01, dan RT. 01, RT. 02 (jangkung) RT. 03 (dukuh pule) RW. 04. Desa Jinkang., Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	-
87	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	tamansari, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
88	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 008 RW 001, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
89	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	kalijar, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
90	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RW. 01. RW. 02, RW. 03, RW. 04 Desa	Rehabilitasi rumah tidak layak	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas

		Jingkrang, Kab. Purbalingga	huni	dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
91	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 001 RW 002, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
92	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 003 RW 002, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
93	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 006 RW 002, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
94	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Gondang Waringin Kembar, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	untuk dapat dilaksanakan dengan dana desa (karena status nya merupakan jalan wewenang desa)
95	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 02 RT.07 RW.02, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)
96	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Gembong Rt.13/07 Dusun 4 dan Rt.09/05 Dusun 3, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	diusulkan tahun 2024
97	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangjambu, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
98	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Dusun II Desakarangjambu dan Dusun I Desa Karangjambu, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	-
99	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sirandu, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	-
100	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sirandu, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan

				usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
101	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RW 005 Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
102	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 03 RT 04 RW 01 KELURAHAN PURBALINGGA KULON, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
103	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 01 RW 01 KELURAHAN PURBALINGGA KULON, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
104	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 01 RW 01 KELURAHAN PURBALINGGA KULON, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
105	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kembaran Kulon Rt 002 Rw 001, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	dianggarkan dari dana kelurahan
106	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
107	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Majasari Dusun I, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
108	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1,2,3,4,5 Desa Cipawon, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
109	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Raya Desa Karanggedang Pekutukan Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN/ESDM)
110	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Majasari RT 004 RW 004 Dusun IV, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	usulan dengan masalah yang dimasukan tidak relevan sehingga kami tidak bisa memproses usulan

111	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Desa Majasari Dusun IV, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	usulan dan masalah tidak relevan sehingga kami tidak bisa memproses usulan
112	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1 Rt 001 s/d Rt 004 Rw 001, Dusun @ Rt 001 s/d Rt 004 Rw 002, Dusun 3 Rt 001 s/d Rt 003 Rw 003, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
113	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Desa Majasari Dusun I, Dusun II dan Dusun III, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	usulan dan masalah tidak relevan sehingga kami tidak bisa memproses usulan
114	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Desa Majasari Dusun I ke Dusun II, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	usulan dan masalah tidak relevan sehingga kami tidak bisa memproses usulan tersebut
115	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Karangnangka, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	sudah mendapatkan DAK 2023
116	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dusun V, RT 001, 002, 003 / RW 005, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	diusulkan tahun 2024
117	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	rw 10 dusun 5 desa bukateja, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
118	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun I RT 05 - RT 06, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa
119	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Karangsari, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)
120	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1 s/d Dusun 5 Desa Bukateja, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
121	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 dan dusun 5, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024

122	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1,2,3 dan 4, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
123	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun III, RT 003 / RW 003, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
124	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1-Dusun 5, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun II, RT 003 / RW 002, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN)
125	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RT 01 RW 07 Dusun III Desa Kedungjati, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	diusulkan tahun 2024
126	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pepedan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
127	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Muntang , Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	PDAM bukan kewenangan dinrumkim
128	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun I, Dusun IV, Dusun V, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau bersurat ke Bupati untuk dibantu penanganan tanah longsor.
129	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun I,II dan III, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	-
130	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Wanogara Kulon, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024
131	Pembangunan SPAM Jaringan	Dusun 1 & 2, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air	diusulkan tahun 2024

	Perpipaan di Kawasan Perdesaan		bersih/sumur Bor di pedesaan	
132	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sumampir RT 01 RW 04 Rembang Purbalingga, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN/ESDM)
133	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
134	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangbanjar, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
135	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kadus 03, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.
136	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tejasari, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
137	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sumampir Dusun II, Dusun V, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
138	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sumampir Semua Dusun, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
139	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Muntang Kec.Kemangkon Kab.Purbalingga, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
140	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantaran Sungai Klawing Desa Majasem, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	-
141	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk	RT 09 RW 03 Dusun 3, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)

	Menunjang Fungsi Hunian			
142	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 1,2.3 ,4 Desa Senon , Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	air untuk pertanian bukan kewenangan dinrumkim
143	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Bokol, Kecamatan Kemangkon, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
144	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Wilayah Dusun I, Dusun II, usun III, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
145	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	gambarsari, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	-
146	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun I, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
147	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pandansari (50 Unit), Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
148	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	karangkemiri rt 01 rw 01, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN)
149	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Panican, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)
150	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Candiwulan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
151	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kantor Desa Panican, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa.

152	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Panican, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
153	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sungai Klawing, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	-
154	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DUSUN 1 S/D 5, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
155	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dusun 2 dan dusun 1 Desa Cendana, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	sudah mendapatkan Bangub dan HAMP tahun 2023
156	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RT 006, 007,008 dan 009, Rw 003 dan 004 Desa Kedarpan 1 unit, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan lewa ESDM Provinsi dan DAK
157	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT 001 RW 006 Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
158	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/Kota	RT 003 RW 006 Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga	Revitalisasi makam desa	Bersurat ke Bupati Purbalingga perihal penggunaan tanah Pemkab untuk perluasan makam kelurahan Bancar
159	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dersa Kejobong rt. 22 rw 11 dan rt 08 rw 04 volume 2 unit sumur bor, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Diusulkan lewat ESDM Provinsi atau DAK
160	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Karangduren Dusun 1, Dusun2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
161	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan

				usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
162	Pembangunan SPAM JAaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Diusulkan lewat ESDM provinsi atau DAK
163	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Karangduren Dusun 3, Kab. Purbalingga	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait (PLN)
164	Pembangunan SPAM JAaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Karangduren Dusun 3, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
165	Pembangunan SPAM JAaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Karangreja, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	diusulkan tahun 2024
166	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Serang Desa Tunjungmuli Kec.Karangmoncol - Dusun Tipar Desa Panusupan Kec.Rembang, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)
167	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dagan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
168	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun II RT 04 RW 03 Desa Danasari, Kab. Purbalingga	Pengadaan Bronjong	-
169	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bojong rt 1 dan 2 rw 1, Kab. Purbalingga	Pemeliharaan jalan poros desa	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan untuk tahun 2024.
170	Bidang Pertanahan	Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	Kerjasama pelatihan dengan komunitas	bukan wewenang dinrumkim untuk dapat diusulkan PTSL ke BPN
171	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.
172	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Majasari, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas

			huni	dan kemampuan keuangan daerah serta kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuh tahun 2024
173	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Majasari Dusun V, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Untuk dapat dilaksanakan dengan Dana Desa. (Status Jalan merupakan jalan desa)
174	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rt 001 Rw 010 Dusun 3 Jl. Soetarjo Bobotsari, Kab. Purbalingga	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	Agar dapat dilaksanakan dengan Dana Desa atau DPU PR (Status jalan merupakan jalan Kabuapten)
175	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	desa Langgar, 2 Paket, Kab. Purbalingga	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Diusulkan lewat ESDM Provinsi dan DAK
176	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Panusupan , Kab. Purbalingga	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kami akan menangani berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta Kami ajukan usulan anggaran perbaikan RTLH untuk tahun 2024.

Selanjutnya usulan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah diperoleh melalui hasil kajian internal masing-masing Bidang yang dikaitkan dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat dan disinkronkan dengan dokumen RPJMD, Program Nasional dan Provinsi.

Disisi lain juga menyerap aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang. Usulan ini selanjutnya disesuaikan dengan acuan yang ada di RPJMD dan kesesuaian dengan program pemerintah Pusat, Provinsi dan ketersediaan dana yang ada serta mempertimbangkan dari tingkatan prioritas pada skala kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan mengkaji Rencana Strategi (Renstra) Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui fokus kinerja kementerian dan Daerah Provinsi dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

3.1.1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan kementerian / lembaga yang memiliki tugas dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian PUPR dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PUPR ditetapkan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementerian PUPR memuat Tujuan dan Sasaran Strategis antara lain yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategi
<p>1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.</p> <p>2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrasetruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i>, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.</p>

3.1.2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dsiperakim) Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Disperakim Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Renstra Disperakim Provinsi Jawa Tengah memuat tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan antara lain yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Disperakim Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Dinrumkim Kab. Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.	1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.	1. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan. 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.	1. Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni 2. Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan 3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 3. Meningkatnya kepastian hukm atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan	3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan. 4. Pengurangan kawasan kumuh 5. Pengembangan PSU 6. Peningkatan kapasitas	4. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan 5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan 6. Penanganan kawasan kumuh Provinsi 7. Peningkatan pengembangan PSU kawasan

	<p>umum</p>	<p>SDM penanganan kawasan permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. 8. Peningkatan tertib administrasi pertanahan 9. Penanganan permasalahan pertanahan 10. Peningkatan kapasitas masyarakat 	<p>permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman 9. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 10. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 11. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 12. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah 13. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat 14. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan 15. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan pertanahan
--	-------------	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada Rencana Kerja Tahun 2024 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik;
- b. Meningkatnya akses air;
- c. Meningkatnya akses saniasi;
- d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Sasaran Kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2024 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021–2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan DINRUMKIM (mendukung misi 1)
2. Meningkatnya akses air minum (mendukung Misi 3)
3. Meningkatnya akses sanitasi (mendukung Misi 3)
4. Meningkatkan kawasan tidak kumuh perkotaan (mendukung misi 3).
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2024 adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang akan berisi 11 program, 18 kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengembangan Perumahan
- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/ Kota
 - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Tahun Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - d. Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha
5. Program Kawasan Permukiman
 - a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
8. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional
 - a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
9. Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
10. Program Penatagunaan Tanah
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kab/ Kota
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja dan pendanaan pada tahun 2024, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PURBALINGGA

Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	PENDAPATAN						
2	BELANJA		33.751.679.000				33.751.679.000
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	13.879.055.000	DAK		1,39%	13.879.055.000
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Bertambahnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kebutuhan air minum	13.879.055.000			1.500 SR	13.879.055.000
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM Berbasis Masyarakat	24.000.000			650 SR	24.000.000
	Peningkatan SPAM Jaringan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di	9.885.955.000				9.885.955.000

	Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kawasan pedesaan yang dibangun					
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang dibangun	3.969.1000.000				3.969.1000.000
b.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	-	DAK		2,5%	-
2.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan persampahan yang terbangun	-			100%	-
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	-			1.400 Rumah Tangga	-
c.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	12.610.000.000	DAK		1,44%	12.610.000.000
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./ Kota	Jumlah SPALD-S yang di bangun	12.610.000.000			300 Rumah	12.610.000.000
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	12.610.000.000			50 Rumah Tangga	12.610.000.000
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
d.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.184.246.000	DAU			4.184.246.000
4.	Perencanaan, Penganggaran,	Persentase ketersediaan laporan	4.500.000			100%	4.500.000

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000			1 Dokumen	2.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2.000.000			3 Dokumen	2.000.000
5.	Administrasi Keuangan	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	3.540.181.000			100%	3.540.181.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.408.445.000			29 Orang / Bulan	3.408.445.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	73.496.000			150 Dokumen	73.496.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	58.240.000			2 Dokumen	58.240.000
6.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	18.527.000			100%	18.527.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.527.000			2 Dokumen	18.527.000
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	35.302.000			100%	35.302.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	681.000			1 Paket	681.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25.000.000			1 Paket	25.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan	1.000.000			12 Dokumen	1.000.000

	Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan yang disediakan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4.956.000			12 Laporan	4.956.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.665.000			2 Dokumen	3.665.000
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	441.280.000			100%	441.280.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	374.000			1 Laporan	374.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	23.366.000			12 Laporan	23.366.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	432.000			5 Laporan	432.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	417.108.000			12 Laporan	417.108.000
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.000.000			1 Orang	4.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4.000.000			1 Orang	4.000.000
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	140.456.000			100%	140.456.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	130.456.000			24 Unit	130.456.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5.000.000			20 Unit	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.000.000				5.000.000
e.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapaainya SPM bidang perumahan	126.987.000				126.987.000
11.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terdatanya rumah korban bencana alam atau relokasi program pemerintah Kabupaten / Kota	24.020.000			100%	24.020.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	20.000.000			1 Dokumen	20.000.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	4.020.000			1 Dokumen	4.020.000
12.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersosialisasinya Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	6.976.000			100%	6.976.000
	Sosialisasi Standar Teknis	Jumlah orang/sukarelawan yang	2.956.000			40 Orang	2.956.000

	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota					
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru	4.020.000			25 Orang	4.020.000
13.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	90.167.000			100%	90.167.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	39.920.000			3 Unit Rumah	39.920.000
	Pembangunan Rumah baru Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang dibangun	50.247.000			3 Unit Rumah	50.247.000
14.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase ijin (rekomendasi) yang diterbitkan	5.824.000			100%	5.824.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	5.824.000			1 Laporan	5.824.000
f.	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	645.434.000	DAU		49,75%	645.434.000
15.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditangani	645.434.000			9 Ha	645.434.000
	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	645.434.000			2 Dokumen	645.434.000
g.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1.519.348.000	DAU		99,32%	1.519.348.000

16.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	1.519.348.000			2.000 Unit	1.519.348.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1.519.348.000			1.000 unit Rumah	1.519.348.000
h.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang layak yang didukung PSU layak	534.972.000			83,02%	534.972.000
17.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditangani	534.972.000			12 Lokasi	534.972.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	531.452.000			1 Lokasi	531.452.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	3.520.000			1 Laporan	3.520.000
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
C.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		249.494.000	DAU			249.494.000
i.	Program Penyelesaian Sengketa	Persentase penanganan sengketa	5.108.000			100%	5.108.000

	Tanah Garapan	tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
18.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Darah Kab/ Kota	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi	5.108.000			100%	5.108.000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.108.000			4 BA	5.108.000
j.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	88.036.000			100%	88.036.000
19.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Persentase dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	88.036.000			100%	88.036.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88.036.000			3 Dokumen	88.036.000
k.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	156.350.000			0,27%	156.350.000
20.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/ Kota	Persentase tanah Pemda eks-bengkok yang dimanfaatkan	156.350.000			81,28%	156.350.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Kab/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota	156.350.000			3 Dokumen	156.350.000
--	--	--	-------------	--	--	-----------	-------------

V. PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa RENJA 2024 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Mengingat kondisi dan situasi yang berkembang serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dan Dokumen Renja 2024 ini sifatnya masih Draf yang masih dimungkinkan adanya perubahan data baik dalam program/kegiatan maupun jumlah anggarannya, karena Penyusunan Renja 2024 ini disusun sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang berikutnya, yaitu Tingkat Forum PD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten serta kegiatan sinkronisasi/penajaman setelah Musrenbang Kabupaten.

Semoga apa yang telah dituangkan dalam RENJA 2024 ini dapat membantu mewujudkan kemajuan dan perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai dengan skala prioritas.

Kepada semua jajaran aparat DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dan segenap lapisan masyarakat serta Unit Kerja / Instansi terkait yang berpartisipasi dalam mewujudkan RENJA 2024 ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Terima kasih .

Purbalingga, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAM HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650104 198607 01 001